

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

2.1. Kajian Pustaka

Studi mengenai isu relasi migran dan Orang Asli Papua (pribumi) telah dilakukan oleh beberapa ahli dengan pendekatan yang beragam. Peneliti dalam kesempatan ini mengutip beberapa karya yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan. Terkait hal ini, peneliti membatasinya pada dua isu utama yaitu penelitian tentang penduduk migran dan penelitian mengenai Papua itu sendiri. Kedua isu besar ini akan memperkaya dan membantu penelitian ini sekaligus memberikan perbedaan dengan antara penelitian yang sebelumnya dengan penelitian ini.

Saprillah (2018), menjelaskan melalui perspektif sejarah bahwa kedatangan etnis migran (orang-orang Islam) ke Tanah Papua (Barat) telah ada sejak abad ke-15. Kedatangan para migran cukup banyak memberikan pengaruh kehidupan sosial masyarakat Papua dan percepatan laju pembangunan di Papua (Sorong), namun seiring dengan kedatangan mereka membawa problem tersendiri, khususnya hubungan antara Kristen dan Islam yang mengarah pada nuansa etnis migran yang Islam dan orang lokal Papua. Terdapat kesamaan pada penelitian dengan melihat kedatangan kaum migran yang bergelut dalam ekonomi dan situasi wilayah ini dihantui ketegangan etnis (Migran-Papua) yang menjurus pada agama. Namun penelitian ini luput pada aspek politik yang mengitari kedua etnis tersebut bagaimana menposisikan diri mereka sejak diberlakukan otonomi khusus Papua. Disinilah letak penulis ingin melihat sejauh mana pola relasi antara kaum migran dan Orang Asli Papua.

Maliepaard, *et.al* (2012), menjelaskan bagaimana masyarakat migran di Belanda menggunakan norma hukum sekuler untuk melawan perbedaan latar belakang keagamaan yang terjadi. Studi ini menunjukkan bahwa ekspresi identitas keagamaan sangat berhubungan dengan integrasi sosial pada

kaum muslim Belanda termasuk para migran Turki dan Maroko sebagai kelompok minoritas dan orang Belanda sendiri sebagai kelompok masyarakat Mayoritas. dengan menggunakan data survey representasi nasional, dapat dibedakan identifikasi keagamaan dari cara praktek agama (ibadah dan praktek norma agama) dan penonjolan (mendukung aturan agama dalam politik dan sosial) sebagai perbedaan bentuk ekspresi keagamaan. Posisi kaum migran pada konteks ini, seperti diperhadapkan kelompok minoritas-mayoritas dalam mengekspresikan agama. Kesamaan penelitian penulis adalah soal hubungan minoritas-mayoritas dalam suatu konteks negara. Sementara perbedaannya adalah kaum minoritas migran muslim di Papua berada pada wilayah mayoritas non muslim di sebuah negara mayoritas muslim.

Talebi, *et.al* (2012), menyoal komunitas Baha'i di Iran yang telah dianiaya pada basis agama mereka selama 150 tahun. Keterbatasan pada segala aspek dalam kehidupan memaksa mereka untuk menghadapi kewarganegaraan kematian (*civic death*) atau bermigrasi ke negara lain. Dengan menggunakan metode kualitatif penelitian ini mengeksplorasi bagaimana pengalaman keterdesakan bermigrasi dan bagaimana agama melemahkan gangguan pada kehidupan orang Bahai Iran. Sebagai strategi adaptasi, pengikut Bahai dibebaskan untuk menempuh tradisi kebiasaan yang parallel yaitu tradisi sebagai orang Iran dan sebagai orang Kanada untuk eksis bersama. Meski demikian ada di antara mereka mereka juga tidak menginginkan penggabungan tersebut karena alasan kesulitan untuk memelihara keseimbangan tradisi. Kesamaan dengan penulis disertasi ini adalah kemampuan adaptasi pengikut Bahai sebagai kelompok minoritas di Kanada yang mampu memparalelkan kehidupan mereka. Sedangkan aspek perbedaannya adalah kelompok Bahai tidak dijelaskan apakah mereka masuk dalam ranah kontestasi politik atau tidak, sementara bagi penulis migran Papua di

Kabupaten Jayapura masuk mengikuti perhelatan setiap kontestasi politik lokal.

Ejorh (2012), mengatakan bahwa studi ini untuk menguji dinamika identitas orang Afrika di zaman modern saat ini di Irlandia. Sebagai tantangan dan sekaligus tesis yang esensial yang terkait homogenitas, malahan mendebatkan konteks pragmatisme migran Afrika di mana selalu menegosiasikan identitas mereka secara multidimensial dan apa yang mereka miliki. Desakan atas pengalaman-pengalaman khusus dan perlunya untuk mengambil strategi personal sebagai adaptasi dan pencantuman. Namun, tanpa menghiraukan tekanan antara minat personal dan identitas kelompok yang berkepentingan, prospek keberadaan pada kebersamaan dalam komunitas migran Afrika, yang didasarkan pada perasaan kebiasaan para migran Afrika dan pengasingan bersama pada Negeri sendiri. Semua karakteristik itu pada akhirnya menjadi sesuatu instrument yang penting pada politik dan efektivitas strategi pada suatu bangunan yang tetap ada pada komunitas politik Afrika di Irlandia.

Ecklund, *et.al* (2013), menjelaskan setelah melakukan interview sebanyak 33 warga Cina Amerika generasi pertama dan kedua dan bertanya bagaimana narasi dan gambaran hubungan antara agama dan kehidupan kewarganegaraan yang dibedakan dengan Budha, Kristen dan non agama orang Cina. Disimpulkan kuatnya hubungan institusional antara agama dan politik di Amerika. Contoh Cina Kristen, Jamaah menyediakan kesempatan untuk melayani pengikut jamaah dan pada komunitas yang lebih luas. Dan sangat baik pada retorika politik sebagai panduan praktek. Orang Budha dengan aktif mengkritisi pendekatan organisasi keagamaan pada masyarakat yang dilayani dan koneksi Amerika antara politik dan dan agama, menekankan pembangunan yang melakat di dalamnya dimensi etik sebagai motivasi pelayanan kepada yang lain. Demikian pula bagi orang Cina yang tidak mengenal agama menekankan aturan dari

organisasi agama media fasilitas bagi sekarelawan. Juga terdapat perbedaan antara generasi pertama dan kedua, dimana yang pertama sangat sulit memahami makna layanan komunitas Amerika.

Kelly, (2012), mengatakan bahwa kasus orang Filipina yang bermigrasi ke Kanada memperlihatkan tiga kelas, *pertama*, masyarakat kelas yang dianggap berguna dapat dilihat pada fenomena mereka secara multidimensional yang termanifestasi pada posisi sosial, proses, penampilan, serta pada aspek politiknya. *Kedua*, setiap dimensi dari kelas hanya dapat mengeksplorasi secara penuh jika ditempatkan dalam bingkai transnasional di mana ada penolakan pada loncatan pandangan bagaimana kelas itu didasari. *Ketiga*, pemahaman kelas sebagai pengalaman dan bersifat subjektif yang dibangun pada makna yang penting dari perbedaan tajam pada aturan kehidupan transnasional para migran. Beliau menyimpulkan bahwa semua hal tersebut di atas mempunyai implikasi pada kelas-kelas secara politik. Persimpangan kelas dengan etnisitas yang didasarkan pada identitas pada tempat kerja misalnya mengurangi solidaritas kelas, juga melahirkan perasaan dari kelas yang disubornisasi pada tahapan temporal, demikian pula pengganti kerugian pemakaian dapat diinterpretasi terhadap oleh orang Filipina.

Jacksoni (2011), menjelaskan bahwa Uni Eropa telah menetapkan komitmen gerakan kebebasan manusia untuk melakukan lintas batas Negara. Uni Eropa sendiri telah mendiskusikan perlunya integrasi. Tulisan ini mempertegas bahwa integrasi bagi para migran dengan dasar misi dan kontekstualisasi, pandangan maju bahwa sentivitas dan saling bijak adalah sangat cocok dalam sebuah integrasi dalam cahaya bible dan missi yang dalam. Pandangan ini sangat kental dengan semangat al kitab sama dengan apa yang terjadi di Papua pasca pembrelakuan otonomi khusus Papua yang mengemuka banyak dalam banyak hal adalah semangat kekeristenan, namun pada hal

yang lain juga memperlihatkan adanya semangat-semangat keagamaan dari masyarakat migran yang datang sulawesi dan Jawa serta wilayah lainnya juga mengespresikan diri dengan semangat budaya dan agama mereka.

Wekke (2018), Penelitian ini menggambarkan bagaimana etnis Bugis dan Madura sebagai identitas perantau yang mempunyai tradisi sejak dahulu sampai akhirnya tiba di Papua Barat bagian Selatan. Daerah-daerah yang ditempati oleh para migran tersebut ada yang mempunyai tingkat kriminalitas yang tinggi dan kejahatan lainnya. Namun disisi lain terdapat pula kedamaian di dalamnya dengan warna masyarakat yang sudah multikultur. Penelitian ini pula menjelaskan bahwa motifasi kedatangan para migran ke tempat tersebut di atas didasarkan pada kepentingan ekonomi dan sosial. Sementara agi penulis apa yang dilakukan oleh para migran di wilayah Papua Barat bagian selatan dari pulau tersebut di atas merupakan bagian dari kebanyakan motifasi masyarakat migran ke tempat lain termasuk di wilayah bagian Papua dan Papua Barat. Terdapat persamaan dengan penelitian penulis dari bagian bahwa kedatangan mereka untuk ekonomi dan sosial tanpa masuk ke wilayah politik. Mereka hanya ingin membangun dan ikut berpartisipasi dalam masyarakat sebagai warga, tanpa dijelaskan oleh peneliti mengapa mereka tidak masuk ke ranah politik.

Baharuddin, dkk (2016) Fokus penelitian ini terletak pada bagaimana pola pemukiman yang terbentuk setelah kota Jayapura menjadi kota yang heterogen. Hasil sensus tahun 2010, komposisi penduduk kota Jayapura lebih didominasi oleh migran dibandingkan dengan Orang Asli Papua. Dari jumlah 256.705 jiwa jumlah penduduk migran (non Papua) biasa disebut “amber” sebanyak 166.932 (65,03%) sedangkan Orang Asli Papua disebut “komin” sebanyak 89.773 jiwa (34,97%). Besarnya arus migrasi orang-orang dari luar ke kota Jayapura sehingga menampakkan wajah heterogenitas kotanya sampai terbentuk pola pemukiman

warga masyarakatnya. Ada pemukiman yang dihuni oleh khusus untuk Orang Asli Papua, ada pula pemukiman yang ditempati oleh Orang Asli Papua yang dari luar Jayapura demikian pula ada pemukiman yang dihuni oleh para migran serta ada pemukiman yang sudah campuran baur antar Orang Asli Papua dan para migran. Tentu alasan mereka membentuk pola pemukiman seperti yang dijelaskan karena didasarkan pada adanya hubungan-hubungan kekerabatan yang dan alasan dekatnya tempat aktivitas kerja yang memudahkan mobilisasi serta karena status sosial yang disandang oleh warga kota tersebut. Terdapat kesamaan pada disertasi penulis yaitu terpolanya pemukiman penduduk yang ada di kota Jayapura dengan Kabupaten Jayapura karena pengaruh arus migrasi yang berimplikasi kepada kehidupan sosial dan ekonomi setempat. Namun terdapat pula perbedaan yang dapat dilihat dari aspek hubungan-hubungan kekerabatan migran yang ada di Kabupaten Jayapura lebih kental dengan semangat soliditasnya dan solidaritanya seperti pada pemukiman asli transmigrasi yang non Papua serta masih mudahnya hubungan-hubungan itu dibentuk dibandingkan dengan kehidupan kota yang warganya serba sibuk.

Miyanti, dkk (2017) dalam penelitian di Desa Bandar Agung, kabupaten Lampung Timur, menjelaskan relasi sosial antara etnis Jawa sebagai migran dan etnis lampung sebagai orang lokal diwarnai dengan konflik antara satu dengan yang lain karena kurang terbuka antara satu dengan yang lain. Disamping karena etnis Jawa kurang bisa beradaptasi dengan lingkungan barunya sehingga sering terjadi pertentangan-pertentangan antara kedua belah pihak. Pertentangan antar mereka juga terjadi karena kedua belah pihak sering saling memberi stereotipe, migran Jawa menyebut orang asli lampung sebagai *Mbilung* , sebuah pelabelan peran antagonis bahwa orang lampung berwatak jahat dan cinta harta. Sementara orang asli lampung melihat masyarakat transmigran Jawa sebagai penjajah tanpa ampun karena semua

menguasai sektor, seperti ekonomi kekuasaan dan pendidikan di tengah mereka sebagai kelompok minoritas di negeri sendiri. Penyelesaian perselisihannya dengan pengelolaan seperti membatasi pergaulan diantara mereka, bermusyawarah dan kegiatan pasca terjadinya konflik. Penelitian tersebut di atas terlihat perbedaan dan persamaan dengan penelitian penulis. Bila kedua etnis (Jawa-Lampung) selalu dalam pergesekan dan konflik sebagaimana halnya dengan etnis migran dan Orang Asli Papua karena sebab seperti tersebut di atas. maka perbedaannya, adalah Orang Asli Papua menghendaki agar seluruh sektor menjadi penguasaan mereka karena adanya perlakuan khusus dengan undang-undang di satu sisi, sementara migran harus bersiasat untuk bertahan dengan situasi yang ada.

Usman (2012), memberikan ulasan yang cukup lugas mengenai penyebab kepindahan etnis Cina ke Aceh. Menurutnya, setelah terjadi kekacauan politik dan ekonomi di daratan Cina, banyak orang Tiongkok bermigrasi ke Nanyang (Asia Tenggara), termasuk ke Nanggroe Aceh Darussalam. Masyarakat Cina terpaksa mengadu nasib di Nusantara dengan melakukan apa saja yang dapat mempertahankan hidupnya di perantauan termasuk dengan bekerja tanpa menyerah. Interaksi dan komunikasi yang digunakan orang Cina migran di Aceh untuk mempertahankan diri dengan pola pemukiman, pendidikan, bisnis, kegiatan sosial, dan hubungan antara karyawan dan pimpinan. Lebih lanjut, Usman menguraikan bahwa etnis Cina di Aceh melalui bahasa dan pendidikan, pernikahan, makanan, peraturan, dan transformasi budaya berkomunikasi secara terbuka dengan penduduk setempat sehingga mereka diterima meskipun memiliki keyakinan (agama) yang berbeda dengan penduduk Aceh yang mayoritas Muslim.

Pabotinggi, dkk (2015) menguraikan mengenai Muslim di Perancis dan Kanada yang minoritas. Buku ini secara substantif membahas secara mendalam tentang kebijakan integrasi politik

Kanada dan Perancis terhadap komunitas migran Muslim dengan nilai Barat. Isu multikulturalisme amat penting, terutama karena dalam sistem demokrasi bagaimanapun caranya kepentingan minoritas etnis dan agama harus diakomodasi tanpa menafikan *nation*. Masing-masing negara (Barat) tidak memiliki intensitas tekanan politik yang sama dalam menghadapi isu multikulturalisme. Negara-negara tersebut mengambil kebijakan yang berbeda dengan selalu merujuk sejarah negara bangsanya. Sistem ketatanegaraan Barat yang mencerminkan *white dominance* atau dominasi kaum putih tidaklah ringan. Rintangan muncul dari sistem kebangsaan negara-negara Barat yang cenderung *ethno-centric* sehingga kadang mempersulit proses pencapaian persamaan politik antara komunitas Muslim dan komunitas putih, akibatnya isu multikulturalisme hanya sekedar slogan dan bungkus pengagungan terhadap Barat.

Mulyasari (2014), menjelaskan bagaimana identitas dan integrasi etnis minoritas selalu membayang-bayangi para imigran (migran) dan keturunannya yang tinggal di tanah rantau. Studi ini merupakan studi komparatif. Menurut Mulyasari, upaya integrasi etnis Tionghoa di Indonesia sudah ada sejak berabad-abad yang lalu, begitu pula etnis Turki di Jerman yang baru beberapa dekade telah ada di Jerman, dengan pelan dan terus berproses dalam integrasi. Pada bagian lain dikemukakan bagaimana imigran atau migran Turki di Jerman yang mengikuti gaya Barat dengan pendekatan multikulturalismenya sebagai sebuah ekspresi politik dalam menyikapi keragaman etnis di Jerman. Namun, pendekatan itu menjadi tidak ideal sebagaimana diakui sendiri Kanselir Jerman Angel Markel. Wujudnya dapat dilihat dengan banyak kebijakan-kebijakan yang mengeliminir nilai-nilai agama orang Turki yang notabene adalah mayoritas migran Muslim.

Pitoyo, dkk (2019) menjelaskan tentang mobilitas suatu penduduk yang melewati suatu wilayah dapat dilihat berdasarkan

pada dimensi wilayah geografis maupun dari aspek dimensi waktunya. Secara geografis bagaimana suatu penduduk melakukan perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain secara internal dalam suatu negara (regional) dan perpindahan penduduk secara eksternal ke negara lain (internasional), sementara dari aspek waktu, yaitu terjadinya perpindahan penduduk secara temporal yang sewaktu-waktu dapat kembali ke kampung halaman kapan saja, sementara yang lainnya terdapat orang yang melakukan perpindahan dengan maksud untuk menetap di suatu tempat secara permanen di daerah tujuan. Apa yang dikemukakan oleh Piyoto, dkk tersebut diatas belum dijelaskan maksud dari mobilitas penduduk yang terjadi baik secara geografis maupun secara waktu, khususnya bagi migran tetap atau permanen untuk mengukur pembuktian kartu identitas sebagai warga setempat (KTP). Maka penulis bermaksud dalam dalam tulis ini adalah mereka yang disebut sebagai migran di Papua adalah mereka yang telah menjadi warga tetap di Papua yang hidup selama ini dengan segala dinamika yang terjadi.

Studi-studi di atas memperlihatkan kompleksitas persoalan yang dihadapi oleh migran Muslim dan migran secara umum dalam berbagai konteks. Persoalan yang paling utama seperti yang disoroti oleh para ahli di atas adalah persoalan bagaimana keuletan migran (muslim) berkomunikasi dan membuka diri untuk diterima oleh pribumi. Studi Wekke di Papua barat bagian Selatan yang menjeslaskan kedatangan migran dan dapat diterima dengan baik dan Studi Baharuddin Kota Jayapura yang menguai tentang heteroginitas warganya sampai kepada bentuk pola pemukiman yang menunjukkan relasi yan dapat dengan mudah dikatakan migran sebagai pendatang dapat beradaptasi dengan lingkungan. Dalam konteks kepindahan orang-orang Tionghoa ke luar (Aceh) misalnya memberikan penjelasan betapa konflik (politik) dalam negeri menjadi pemicu perpindahan orang dalam jumlah besar dan mencari penghidupan

ke negara-negara lain. Demikian pula migran muslim di Jerman yang diakui sendiri oleh pemimpin politiknya bahwa tidak semudah untuk menyesuaikan dengan dengan kondisi yang ada pada realitas barat. Bagaimana identitas keagamaan sangat berhubungan dengan identitas sosial di Belanda. Perlunya penyesuaian dalam berbagai konteks di negeri tujuan seperti halnya migran Bahai Iran di Kanada dan orang Filipina dalam kelas-kelas politik karena persimpangan etnisitas, demikian halnya orang Afrika di Irlandia yang mampu menegosiasikan identitas mereka secara multidimensi yang mereka milik. Juga migran Cina di Amerika yang mampu menguatkan hubungan institusional mereka dengan Amerika. Intinya dampak atau implikasi-implikasi secara politik yang dialami di tempat lain para migran dengan pengalaman mampu melakukan negosiasi identitas dalam rangka pragmatisme, bila diperlukan melakukan melakukan integrasi. Demikian pula studi Sapriillah yang memberikan penjelasan mengenai keberhasilan migran sehingga memicu ‘kecemburuan’ penduduk asli. Demikian pula kasus di Lampung oleh Miyanti antara pendatang Jawa dengan orang lokal Lampung. Kasus seperti ini merupakan kasus yang lazim dan dapat ditemukan di mana-mana. Dan Pitoyo membagi secara umum setiap migrasi kepada aspek geografis dan waktu.

Terkait Papua, beberapa karya telah diterbitkan menyangkut kondisi sosial, politik, dan agama di Papua. Suryawan (2014), menjelaskan tiga poin penting dalam buku ini. Pertama, ia menguraikan kompleksitas status politik dalam memetakan gerakan-gerakan “nasionalisme Papua” yang pernah terjadi dimasa lalu, Kedua, gerakan-gerakan kontemporer yang memperlihatkan bangkitnya suara-suara yang terpinggirkan (*subaltern*), suara-suara gugatan dari “ nasionalisme Papua” terhadap status politik dan kehadiran Indonesia di Tanah Papua, ketiga, buku ini merefleksikan bagaimana praktek kolonisasi dan respon gerakan sosial yang terjadi selama di Tanah Papua. Apa

yang diungkapkan buku tersebut merupakan gambaran posisi Indonesia yang paradoks di Papua. Papua secara *de jure* adalah bagian dari NKRI yang tidak perlu dipersoalkan lagi karena pengakuan dunia internasional, namun secara *de facto*, bangsa Papua merasa ada yang kurang dan tidak terintegrasikan dalam Negara Indonesia.

Pamungkas (2008), menjelaskan bahwa di Papua terjadi pertarungan identitas antara Muslim Papua, Migran Muslim, dan Kristen Papua. Dalam kondisi demikian, Muslim Papua berusaha memadukan antara keislaman dan ke-Papuaan dalam arena politik identitas. Identitas etnik dan agama menjadi instrument politik. Kompleksitas persoalan di Papua memang memiliki sejarah panjang. Hubungan antara Islam dan negara juga menyimpan persoalan. Islam sering diidentikkan dengan Indonesia, sementara Papua sering dilekatkan dengan separatisme dan berbagai isu lainnya yang tentu saja tidak menguntungkan semua pihak.

Warta (2011), melihat agama sebagai salah satu faktor terjadinya konflik di Papua. Baginya, konflik di Papua tidak selamanya benar jika hanya dilihat sebagai persoalan politik, etnis, dan lingkungan. Masalah agama merupakan persoalan penting dalam hubungannya dengan dinamika kehidupan di Papua. Ia mengilustrasikan bahwa jika agama Hindu, Budha, dan Konfusiisme berada dalam posisi marginal, maka Islam dan Kristen memiliki pengaruh yang sama, terutama ketika kompetisi keduanya semakin meningkat. Sementara itu, negara dan nasionalisme Indonesia dianggap bersifat Islam. Hal ini semakin menegaskan bahwa Papua memang berbeda dengan Indonesia sehingga kondisi seperti ini dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk memperburuk suasana (konflik) yang sudah ada.

Warta juga mengakui bahwa akar konflik panjang yang terjadi antara masyarakat Papua dengan pemerintah bermula dari kebijakan transmigrasi di masa rezim Orde Baru. Hal ini

dikarenakan ideologi Soeharto tentang ‘pemindahan penduduk’ tersebut didasarkan pada asumsi tentang keunggulan para migran baru. Ia melihat bahwa para migran tersebut membawa modernitas ke daerah-daerah terpencil seperti Papua. Bahkan, masyarakat Papua dianggap sebagai masyarakat tertinggal yang harus ‘dijadikan berbudaya’. Konstruksi tentang masyarakat Papua seperti ini masih berlangsung hingga saat ini sehingga para migran pun dianggap sebagai ‘penjajah’ terhadap masyarakat Papua.

Myrntinen (2015), menjelaskan bagaimana simbol keagamaan memainkan peran yang sangat penting dalam nasionalisme Papua/ Hal ini terlihat ketika Kongres Papua III mengibarkan bendera Bintang Kejora sebagai simbol Papua dan disertai dengan bendera Israel. Fenomena ini memberikan anggapan bahwa Tanah Papua sama dengan Tanah Israel sebagai tanah yang telah dijanjikan Tuhan. Semangat teologi Kristen sangat mewarnai kepapuaan sehingga wacana dominan yang mengemuka bahwa Orang Asli Papua adalah Kristen dan yang lain bukan Papua. tentu sangat kontras dengan keberadaan migran yang telah lama di Papua yang sewaktu-waktu dapat menjadi gesekan antara satu dengan pihak lain.

Lefaan (2012), berbicara tentang saat terjadi perubahan konstelasi politik nasional dengan berakhirnya rezim Orde Baru. Implikasinya terjadi pula di Papua dengan berbagai dinamika politik lokal. Papua mendapatkan otonomi khusus sebagai sebuah kompromi politik atas tuntutan gerakan Papua Merdeka. Perjalanan Otonomi ternyata menyimpan banyak permasalahan terutama terkait isu etnosentrisme dan merebaknya praktik politik representasi di kalangan elit Papua. Ternyata Praktek etnosentrisme itu telah berlangsung dalam ranah politik, birokrasi, dan sosial-ekonomi. Dalam ranah sosial dipertegas oleh peneliti dengan terbelahnya etnosentrisme orang Papua menjadi Papua daratan dan orang Papua gunung kemudian dieksploitasi

segenap elit politik lokal Papua untuk merebut kekuasaan dalam aneka kontestasi politik.

Sementara itu, Asyhari, dkk (2015), menjelaskan tentang situasi Papua yang meliputi aspek migrasi, pendidikan, ekonomi dan politik. Menurutnya, walau bukan faktor satu-satunya namun migrasilah yang banyak mempengaruhi situasi Papua pada aspek-aspek lainnya termasuk aspek politik. Konflik yang terjadi di Papua antara orang migran dan Orang Asli Papua sebenarnya berawal dari keterdesakan orang Papua dari aspek ekonomi karena dalam hal pendidikan orang Papua kalah bersaing, lalu isunya dibawa kepada isu agama yang sebenarnya adalah isu sertaan bukan isu utama. Pada bagian lain juga dijelaskan mengenai keragaman suku bangsa dan agama yang dapat menjadi modal sosial bagi perdamaian Papua.

Suawe, dkk (2012), memperlihatkan bagaimana konstruksi identitas kepapuaan dalam relasinya dengan narasi dominan, yaitu Negara dan agama yang selama ini menjadi faktor eksternal yang cukup dominan dalam dalam mengkonstruksi keidentitasan orang Papua. Studi ini menggambarkan bahwa di masa lalu konstruksi identitas kepapuaan dikonstruksi oleh kekuatan Negara dengan politik penyeragaman. Pada masa tersebut orang Papua mengalami marginalisasi politik, ekonomi, sosial budaya oleh pemerintah pusat. Politik persamaan, kesatuan dan persatuan inilah yang menjadikan Papua sebagai wilayah marginal sebelum bergulirnya era reformasi.

Alhamid (2015), menjelaskan hubungan Islam dan Kristen di Papua, khususnya di Kota Jayapura kaitannya dengan banyaknya konflik keagamaan. Meskipun Islam dan Kristen merupakan agama serumpun *abrahamik*, dalam perjalanan keduanya sering berlebihan dalam menampakkan eksistensinya. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa hal, seperti sikap mereka yang menonjolkan identitasnya seperti tanda salib dan bulan sabit; kontestasi dalam pembangunan sarana ibadah; adanya

klaim Papua sebagai “Tanah Yang Diberkati” yang disimpulkan oleh elit politik lokal sebagai tanah milik orang Kristen sehingga mereka lebih diuntungkan, sementara pihak Islam memilih jalur di luar birokrasi; dan penggunaan agama sebagai justifikasi kepentingan memberikan ruang bagi terciptanya segregasi dalam skala luas bagi Orang Asli Papua dan migran. Keduanya berada dalam pusaran saling mencurigai.

Snanfi, dkk (2018), Dalam penelitian di Kota Sorong, Papua Barat, otonomi khusus Papua telah melahirkan politik identitas etnik yang sangat kental, egoisme kampung, budaya, bahkan saudara dalam kontestasi pemilihan kepada daerah diantara sesama Orang Asli Papua sendiri (etnis Maybrat dan etnis Moy). Egoisme etnik ini, akhirnya saling memarginalisasi dalam berbagai hal sebagai bagian dari strategi kampanye. Etnik Maybrat kemudian berkolaborasi dengan etnis migran karena telah disepakati adanya perjanjian politik dengan calon walikota dari unsur Orang Asli Papua Maybrat dan wakil walikota adalah etnik Makassar. Kolaborasi lewat adanya *deal* politik antara satu dengan yang lain dalam dunia politik adalah sesuatu yang lumrah adanya sebagaimana pada kasus Kota Sorong tersebut di atas, serupa halnya dengan yang terjadi di Kabupaten Jayapura antara etnis Orang Asli Papua dengan migran, namun dalam relasi politik yang terjadi pada Kabupaten Jayapura tidak didapati adanya perjanjian bahwa yang harus menjadi pasangan Orang Asli Papua dari etnis makassar atau dari etnis migran tertentu. Semua pasangan yang muncul dalam kontestasi politik lokal didasarkan pada adanya kesepakatan dan kesamaan pandangan dengan calon pasangan baik dari aspek modal sosial (massa) dan modal media dan tak kalah pentingnya adalah modal finansial.

Warami, (2013), dalam penelitiannya menguraikan bagaimana metafora politik digunakan pada konteks Papua. Melalui pidato-pidato politik, slogan politik komitmen politik atau dokumen status diuraikan secara gamblang dari substansi

otonomi khusus, soal pemekaran daerah dan isu merdeka. Bila otonomi khusus Papua lebih banyak dimaknai sebagai bentuk pelepasan diri atau kesetaraan diri dari keterbelengguan pihak lain. Demikian pula dengan otonomi khusus seakan menjadi pemutusan terhadap sejarah masa lalu terhadap kondisi Papua, yaitu penyangkalan historis yang selama ini dirasakan ketidakadilan, ketidaksetaraan. Hal yang sama dengan slogan-slogan yang ada pada saat ini merupakan bagian dari bentuk metafora yang dipraktekkan oleh Orang Asli Papua terhadap situasi yang terjadi di masa lalu dan keinginan untuk keluar dari penjara ketidakadilan menuju kepada kehidupan merdeka. Namun bila dilihat dari slogan-slogan tidak cukup hanya disebut sebagai bentuk metafora terhadap kondisi yang terjadi di Papua, tetapi slogan-slogan tersebut sudah menjadi bentuk aksi nyata dari terbebasnya Orang Asli Papua dari belenggu yang sama ini mengungkung mereka dengan legitimasi undang-undang otonomi khusus Papua yang memberikan keleluasaan.

Ismail, dkk (2018) Penelitian ini menjelaskan peran sumber daya manusia atau SDM sangat penting dalam proses menuju kepada kesejahteraan. Objek penelitian yang dilakukan di wilayah Wamena, kabupaten Jayawijaya, Papua dengan pendekatan kualitatif, ternyata didapatkan bahwa pengembangan sumber daya masyarakat dengan memberikan peluang yang seluas-luasnya dan pelibatan mereka dalam proses pencapaiannya adalah tergantung pada sejauh mana mereka dapat menggali potensi diri. Potensi pengembangan sumber daya tersebut lebih banyak didapatkan dari spiritualisasi diri lewat pendidikan terlebih pada pendidikan Islaman. Aspek pendidikan di sini mempunyai kesamaan dengan apa yang dilakukan oleh migran di Kabupaten Jayapura dalam menghadapi semangat tekanan otonomi khusus papua dengan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan yang berbasis keislaman, tetapi perbedaannya terletak pada keterbukaan kepada pihak lain (orang Papua) dengan

dimungkinkannya belajar di lembaga tersebut. Penelitian Ismail tidak menguraikan secara spesifik lembaga apa yang dijadikan media dalam pengembangan sumber daya manusia di wilayah penelitiannya.

Studi-studi mengenai Papua seperti yang telah diuraikan di atas memberikan penjelasan yang cukup tajam mengenai posisi migran di hadapan Orang Asli Papua. Para migran, menurut beberapa uraian tadi, diposisikan selain sebagai kelompok migran, juga dianggap sebagai kelompok yang nantinya menjadi ancaman serius bagi orang-orang Papua. Studi-studi tersebut juga menguraikan secara cukup lengkap mengenai perjalanan panjang orang-orang Papua dalam menentukan nasionalismenya. Lalu setelah terjadinya otonomi khusus Papua relasi antara migran dan Orang Asli Papua dibangun dengan didasarkan pada adanya deal politik yang saling menguntungkan. Demikian pula dalam dinamika politik terlihat pemakaian metafora politik dalam menggambarakan kebebasan yang berbeda pada masa lalu. Oleh karena itu, keberadaan para migran yang ada termasuk melalui program transmigrasi di era Orde Baru telah memberikan nuansa baru bagi pola relasi penduduk di Papua yang terlihat mereka lebih di atas dalam kemampuan sumber daya. Hal ini kemudian berubah menjadi isu etnis yang menjelma menjadi isu agama yang sering digunakan oleh para aktor dalam memberikan penilaian terhadap para migran di Papua hingga saat ini.

Namun demikian, Peneliti belum menemukan studi yang fokus pada upaya migran di Papua yang mayoritas Muslim menghadapi berbagai persoalan yang melingkupi keberadaannya khususnya pasca pemberlakuan Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 21 tahun 2001. Juga karena kajian selama ini tentang Papua lebih banyak diwarnai tentang Orang Asli Papua dan keberpihakan kepada mereka, sementara orang cenderung melupakan dampak yg terjadi pada migran dari kebijakan otonomi khusus tersebut. Disertasi ini juga melihat isu tentang

migran seperti tulisan-tulisan yang telah dirujuk diatas, namun konteks utama pembahasannya meliputi upaya migran berstrategi bukan hanya karena mereka berada di tempat yang baru, tetapi juga oleh karena adanya undang-undang yang secara tegas telah memposisikan migran sebagai warga kelas dua. Oleh karena itu, studi ini akan difokuskan pada strategi migran di tengah dinamika yang dihadapi akibat pemberlakuan otonomi khusus Papua dengan pola relasi yang terjadi selama ini baik dari aspek ekonomi, politik dan sosial keagamaan. Hal ini, bagi peneliti, menarik tidak hanya karena belum ada yang melakukannya, tetapi juga karena isu relasi migran dan penduduk asli di Papua menyimpan beragam potensi masalah yang harus segera diselesaikan. Salah satu cara menyelesaikannya adalah menemukan formulasi kebijakan melalui studi mendalam. Disinilah studi ini akan berkontribusi.

2.2. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritis yang akan digunakan dalam menganalisis persoalan pokok penelitian ini adalah Teori Konstruksi Sosial dari Peter L. Berger/ Thomas Luckmann, Teori Modal dari Pierre Bourdieu dan Teori Politik Identitas dari Manuel Castells. Ketiga teori ini dipandang relevan untuk menganalisis persoalan keberadaan dan keberlangsungan Migran Muslim di Kabupaten Jayapura Papua.

2.2.1. Migran Muslim

Selain beberapa konsep di atas, peneliti juga menggunakan konsep migran dalam mengkaji fenomena Muslim di Kabupaten Jayapura. Kata migrasi berasal dari bahasa Latin yaitu *migrare* yang berarti perubahan tempat tinggal atau perpindahan ke wilayah lain (pindah kota atau negara) yang dapat mempengaruhi peningkatan etnis populasi di wilayah tertentu. Alasan migrasi paling sering disebabkan oleh faktor ekonomi karena migrasi sudah dianggap sebagai jawaban sementara atas

permasalahan pengganguran dan kemiskinan (Ullah & Alkaff, 2018: 6). Konsep migrasi juga berkaitan dengan politik, layanan, pemerintahan, kejahatan dan konflik, hukum, aturan dan lain sebagainya (Popkova, 2020: 298-302). Pengklasifikasian migrasi didasarkan pada motif yang berkepentingan seperti ekonomi, reuni keluarga atau untuk keselamatan (Douglas et al., 2019) seperti pada peristiwa setelah perang dunia kedua yang menyebabkan banyak migran perang di berbagai wilayah, akan tetapi berdasarkan Konvensi Jenewa IV tahun 1949 pada Pasal 73 Protokol Tambahan I tahun 1977 yang tidak mengakui orang-orang yang sebelum perang dunia kedua dan menyatakan bahwa mereka adalah orang tanpa kewarganegaraan, karena belum ada penerapan hak atas para migran paksa seperti migran karena perang (Yastrebova, 2019: 145). Di banyak kasus para migran selalu mendapatkan diskriminasi dari berbagai pihak seperti migran di Cina dan Hongkong (Xie et al., 2017: 616; Rother, 2017: 5).

Di Indonesia, Papua adalah salah satu daerah yang menjadi tujuan migrasi bagi orang Indonesia. Secara statistik mayoritas penduduk Papua beragama Protestan, Katolik pada tempat kedua dan Islam pada tempat ketiga. Muslim di Papua umumnya merupakan para migran dari luar pulau Papua. Aliran migran di Papua dimulai saat Indonesia mendapatkan legitimasinya di Papua. Hal ini juga didorong oleh adanya program transmigrasi dari pemerintah pusat dengan memindahkan orang dari Pulau Jawa dan pulau lain yang sudah mengalami *over* populasi. Akan tetapi, ini tidak serta merta membantu perkembangan muslim di Papua di mana saat orang Kristen Papua mendapat bantuan struktural dari badan agama dan organisasi tertentu, orang Papua Muslim tetap menjadi pendukung (Viartasiwi, 2013: 863-865). Begitu juga dengan Provinsi Papua Barat dengan kelompok etnis migran terbesar yang berasal dari Jawa. Sedangkan untuk kelompok Papua

terbesar di Papua Barat adalah Arfak, Biak-Numfor, dan Afiat. Tanah Papua kemudian dipolarisasi secara etnis karena keragaman di antara Papua dan para pendatangnya. Papua Barat sendiri terdiri dari Papua sebanyak 51,48 persen yang hampir sama dengan migran, 48,51 persen (Ananta et al., 2016: 465).

2.2.2. Konstruksi Sosial

Konstruksi sosial atas realitas (*social construction of reality*) didefinisikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi di mana individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama (Poloma, 2015: 301). Teori ini sesungguhnya berasal dari paradigma konstruktivis yang selalu melihat realitas sosial yang terjadi dalam kehidupan sebagai hasil dari konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu atau seseorang manusia bebas. Individu atau seseorang menjadi aspek penentu dalam dunia sosial yang dikonstruksi berdasarkan kehendak. Manusia dalam hal ini memiliki banyak kebebasan untuk bertindak di luar batas kontrol struktur dan pranata sosialnya dimana individu melalui respon-respon terhadap stimulus dalam dunia kognitifnya. Dalam proses sosial, individu manusia dipandang sebagai pencipta realitas sosial yang relatif bebas di dalam dunia sosialnya.

Dalam aliran filsafat, gagasan konstruktivisme telah muncul sejak Socrates menemukan dalam tubuh manusia, sejak Plato menemukan akal budi (Bertens, 1999: 89 – 106). Gagasan tersebut semakin lebih kongkrit setelah Aristoteles mengenalkan istilah, informasi, relasi, individu, substansi, materi, esensi, dan sebagainya. Ia mengatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial, setiap pernyataan harus dibuktikan kebenarannya. Kunci pengetahuan adalah fakta (Bertens, 1999: 137 – 139). Aristoteles pula yang memperkenalkan ucapannya '*cogito ergo sum*' yang berarti "saya berfikir karena itu saya ada". Kata-kata tersebut menjadi dasar yang kuat bagi perkembangan gagasan-gagasan konstruktivisme sampai saat ini. Menurut Vico dalam Suparno,

bahwa hanya Tuhan sajalah yang dapat mengerti alam raya ini karena hanya dia yang tahu bagaimana membuatnya dan dari apa ia membuatnya. Sementara itu, orang hanya dapat mengetahui sesuatu yang telah dikonstruksinya (Suparno, 1997: 24).

Lebih lanjut Suparno (1997: 25) mengatakan sejauh ini ada tiga macam konstruktivisme yakni konstruktivisme radikal; realisme hipotesis; dan konstruktivisme biasa. (a) Konstruktivisme radikal hanya dapat mengakui apa yang dibentuk oleh pikiran. Bentuk itu selalu representasi dunia nyata. Kaum konstruktivisme radikal mengesampingkan hubungan antara pengetahuan dan kenyataan sebagai suatu kriteria kebenaran. Pengetahuan bagi mereka tidak merefleksikan suatu realitas ontologisme obyektif, namun sebuah realitas yang dibentuk oleh pengalaman seseorang. Pengetahuan selalu merupakan konstruksi dari individu yang mengetahui dan tidak dapat ditransfer kepada individu lain yang pasif. Oleh karena itu, konstruksi harus dilakukan sendiri olehnya terhadap pengetahuan itu, sedangkan lingkungan adalah sarana terjadinya konstruksi-konstruksi itu; (b) Realisme hipotesis, pengetahuan adalah sebuah hipotesis dari struktur realitas yang mendekati realitas dan menuju kepada pengetahuan yang hakiki; (c) Konstruksi biasa mengambil semua konsekuensi konstruktivisme dan memahami pengetahuan sebagai gambaran dari realitas itu. Kemudian pengetahuan individu dipandang sebagai gambaran yang dibentuk dari realitas obyektif dalam dirinya sendiri.

Dari ketiga macam konstruktivisme, terdapat kesamaan di mana konstruktivisme dilihat sebagai sebuah kerja kognitif individu untuk menafsirkan dunia realitas yang ada karena terjadi relasi sosial antara individu dengan lingkungan atau orang disekitarnya. Individu kemudian membangun sendiri pengetahuan atas realitas yang dilihat itu berdasarkan pada struktur pengetahuan yang telah ada sebelumnya, inilah yang oleh Berger

dan Luckmann disebut dengan “konstruksi sosial” (Berger, 1990).

Teori konstruktivisme berusaha menjelaskan bagaimana perilaku saling dipengaruhi secara struktur sosial, baik materi maupun ide (Burch, 2002: 21). Sehingga lebih jauh para konstruktivisme melihat tiga hal pokok utama yang secara ontologi disarankan untuk diurai, yakni, (a) Perhatian terhadap “fakta sosial” (seperti ide, norma, dan identitas) sebagai hal utama, bila tidak didahulukan, maka faktor determinasi dari formasi identitas dan aksi politik dari aktornya sendiri; (b) Kesepakatan bahwa kelakuan didasarkan pada interpretasi makna sosial yang dibagikan secara intersubjektif dengan kelompok pelaku sosiopolitik; (c) Kesepakatan pada saling keteraturan bersama dari struktur sosial dan agen manusia yang berdasar pada aturan (atau karena alasan) bagi sebuah pemberian hasil secara politik (Price, R. and C. Reus-Smit, 1998: 268 -269; Klotz, A. and C. Lynch, 2007).

Arifiyanto (2001: 37) meyakini makna dalam hubungan antar manusia (termasuk dalam kegiatan politik) hanya memungkinkan dapat terjadi pada konteks intersubjektifitas, di mana para pelaku membangun perhatian, pilihan dan tujuan didasarkan pada pertalian dengan aktor-aktor lain. Fakta sosial seperti norma-norma, identitas, bahasa dan budaya dan ideologi membantu untuk menciptakan para identitas aktor, membentuk perhatian mereka dan menuntun perilaku mereka secara baik.

Bagi Berger dan Luckmann (1990: 28 – 29) institusi masyarakat tercipta dan dipertahankan atau diubah melalui tindakan dan interaksi manusia. Meskipun masyarakat dan institusi sosial terlihat nyata secara objektif, namun pada kenyataan semuanya dibangun dalam defenisi subjektif melalui proses interaksi. Olehnya tidak heran jika kenyataan hidup sehari-hari pun memiliki dimensi-dimensi obyektif dan subjektif. Objektivitas baru bisa terjadi melalui penegasan berulang-ulang

yang diberikan oleh orang lain yang memiliki defenisi subjektif yang sama. Pada tingkat generalitas yang paling tinggi. Manusia menciptakan dunia dalam makna simbolis yang universal, yaitu pandangan hidupnya yang menyeluruh, yang memberi legitimasi dan mengatur bentuk-bentuk sosial serta memberi makna pada berbagai bidang kehidupannya.

Proses konstruksi, jika dilihat dari perspektif teori Berger dan Luckmann berlangsung melalui interaksi sosial yang dialektis dari tiga bentuk realitas yakni *subjective reality*, *symbolic reality* dan *objective reality*. *Pertama, Objective reality*, merupakan suatu kompleksitas defenisi realitas (termasuk ideologi dan keyakinan) serta rutinitas dan tingkah laku yang telah mapan terpola, yang kesemuanya dihayati oleh individu secara umum sebagai fakta. *Kedua, symbolic reality*, merupakan semua ekspresi simbolik dari apa yang dihayati sebagai “*objective reality*” misalnya teks produk industri media, seperti berita di media cetak atau elektronika, begitu pun yang ada di film-film. (bagi penulis, pada masyarakat Papua, seperti istilah migran dan Orang Asli Papua) *Ketiga, subjective reality*, merupakan konstruksi defenisi realitas yang dimiliki individu dan dikonstruksi melalui internalisasi. Realitas subjektif yang dimiliki masing-masing individu merupakan basis untuk melibatkan diri dalam proses eksternalisasi, atau proses interaksi sosial dengan individu lain dalam sebuah struktur sosial. Melalui proses eksternalisasi itulah individu secara kolektif berpotensi melakukan objektivikasi, memunculkan sebuah kontruksi *objective reality* yang baru (Hidayat, 2003).

Selain itu, juga berlangsung dalam proses dengan tiga momentum simultan, eksternalisasi, objektivikasi, dan internalisasi. Teori konstruksi sosial bagi Berger dan Luckmann menegaskan bahwa manusia dipandang sebagai pencipta kenyataan sosial yang objektif melalui proses eksternalisasi, sebagaimana kenyataan objektif mempengaruhi kembali manusia melalui

proses internalisasi (yang mencerminkan kenyataan subjektif). Dalam konsep berpikir dialektis, Berger memandang masyarakat sebagai produk manusia dan manusia sebagai produk masyarakat. Karya ini menjelajahi berbagai implikasi dimensi kenyataan objektif dan subjektif dan proses dialektis objektivasi, internalisasi, dan eksternalisasi.

Eksternalisasi adalah penyesuaian diri dengan dunia sosio-kultural sebagai produk manusia (*society is a human product*); obyektivasi adalah interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi (*society is an objective reality*), dan internalisasi adalah individu mengidentifikasi diri di tengah lembaga-lembaga sosial di mana individu tersebut menjadi anggotanya (*man is a social product*) (Sukidin, 2002: 206). Ketiga momen tersebut serta masalah legitimasi yang berdimensi kognitif dan normatif, maka kenyataan sosial tidak lain adalah suatu konstruksi sosial buatan masyarakat sendiri dalam perjalanan sejarahnya dari masa silam ke masa kini dan menuju masa depan.

Pada konteks Konstruksi sosial ini, maka keberadaan Migran Muslim kemudian menyebar dan menjadi pengetahuan umum (orang banyak) setelah berbagai interaksi terjadi di kalangan migran dengan Orang Asli Papua. Kedua pihak pun kemudian saling mengenal dan mengetahui posisi masing-masing. Proses ini menjadikan migran muslim tidak hanya terbatas pada kelompok yang memang datang dari luar Papua, tetapi mereka juga telah menjadi bagian dinamika pergaulan sosial di Papua. Proses ini disebut sebagai proses objektivasi, yaitu proses peresapan identitas migran muslim yang awalnya hanya dikenal diinternal migran, berubah menjadi pengetahuan umum dan dikenal oleh masyarakat luas. Pada tahap berikutnya, migran Muslim pun kemudian dianggap sebagai bagian dari masyarakat Papua yang disebut dengan internalisasi. Salah satu proses yang penting disini adalah proses pelembagaan ditingkat

lokal yang selalu menempatkan Migran Muslim sebagai ‘lawan’ dari orang Asli. Otonomi Khusus yang diberlakukan di Papua merupakan salah satu instrumen penting dalam proses pelebagaan Migran Muslim sebagai bagian penting dari dinamika kehidupan sosial di Papua terlepas dari berbagai isu kontroversial yang mengikutinya. Mereka pun selalu berada diranah yang berlawanan dengan masyarakat asli, bahkan selalu melakukan beragam upaya untuk menunjukkan eksistensinya termasuk bagaimana menjamin keberlangsungannya di masa mendatang.

2.2.3. Modal

Bourdieu merumuskan suatu relasi praktik sosial dalam masyarakat yang meliputi Habitus, Ranah dan Kapital. Hal ini menjelaskan bahwa bentuk relasi atau hubungan sesederhana apapun antara individu dan struktur yang ada melibatkan tiga rumusan tersebut di atas. Habitus adalah merupakan nilai-nilai yang dihayati oleh manusia dan terlahir melalui cara sosialisasi nilai-nilai waktu lama sehingga menjadikan manusia mempunyai cara berpikir dan berperilaku (Sulasono dan Suswanta, 2016). Bila habitus mendasari terbentuknya ranah, sementara ranah menjadi lokus bagi habitus. Ranah atau arena adalah jaringan relasi antarposisi objektif di dalamnya (Bourdieu dan Waquant, 1992:97); Ritzer dan Goodma, 2010: 582).

Dengan kata lain ranah adalah sebuah arena kekuatan yang di dalamnya usaha perjuangan untuk mendapatkan kapital (sumber daya), juga merupakan arena untuk mendapatkan dan dekat pada arena kekuasaan, demikian pula ranahlah sebagai pembimbing pengatur strategi bagi posisi, baik individu maupun kelompok, untuk melindungi posisi mereka berkaitan dengan jenjang pencapaian sosial. Sementara kapital sendiri adalah meliputi aspek, kapital ekonomi, kapital budaya, kapital sosial serta kapital simbolik (Sulasono dan Suswanta, 2016; Adib, 2012). Dalam suatu masyarakat selalu terjadi hubungan

kontestasi yang berakibat pada dominasi satu dengan yang lain (Bourdieu dan Waquant, 1992:106). Hubungan dominasi tersebut dipengaruhi oleh situasi, sumber daya (*capital*) dan strategi pelaku (Haryatmoko, 2017: 45).

Bagi Bourdieu setidaknya empat modal atau kapital tersebut dijadikan pemetaan dalam hubungan suatu masyarakat. Kapital ekonomi atau modal ekonomi merupakan modal, sumber daya yang dapat dijadikan sarana produksi dan sarana finansial yang meliputi alat produksi, materi dan uang yang dengan mudah digunakan untuk segala tujuan serta diwariskan dari satu generasi ke generasi berikut. kemudian modal budaya seperti ijazah, pengetahuan, budaya, cara berbicara, kemampuan menulis, cara pembawaan, cara bergaul yang berperan dalam penentuan kedudukan sosial, selanjutnya modal sosial sebagai sumber daya yang terkait dengan jaringan atau hubungan saling mengenal dan mengakui satu sama lain dan modal simbolik sebagai bentuk bagaimana seorang individu atau kelompok dipersepsikan dalam satu konteks sosial (Sulasono dan Suswanta, 2016). Keempat modal tersebut ini dapat saja membentuk stuktur dalam lingkup sosial, amun diantara berbagai macam modal tersebut, modal ekonomi dan modal budaya yang dominan menentukan di dalam memberikan kriteria pembedaan atau diferensiasi yang paling relevan bagi lingkup suatu masyarakat. Setiap individu menempati suatu posisi dalam ruang sosial multidimensional.

Berbagai kapital atau modal tersebut seperti terpisah satu sama lain dan terkesan berdiri sendiri, tetapi dalam kenyataan praktek keseharian ternyata tidak dapat dipisahkan karena saling terkait, ada semacam konversi antar modal-modal tersebut. Menurut Bouerdieu, karakteristik bentuk-bentuk kapital tersebut dapat dipertukarkan satu sama lainnya dan dapat bertambah atau berkurang. Semakin besar seseorang mengakumulasi kapital tertentu, maka akan semakin besar pula peluang untuk

mengkonversi antar kapital. Seperti seseorang yang mempunyai kelebihan kapital ekonomi. kapital ini paling mudah dikonversikan ke kapital kapital lain (Bourdieu, 1994: 20,22,31-56) dengan kapital tersebut dapat leluasa menampilkan kedermawanannya dengan mendirikan yayasan sosial keagamaan dengan memanfaatkan networking dengan penguasa dan pengusaha (kapital sosial) untuk memperoleh image sebagai orang baik dan mendapatkan otoritas serta legitimasi sebagai pembela orang miskin (kapital simbolik) (Fashri, 2016).

Mengacu pada pemikiran tentang modal tersebut di atas, maka sejauh ini eksistensi Migran Muslim di Kabupaten Jayapura, Papua dapat dikatakan memiliki kapital-kapital tersebut seperti halnya dalam bidang ekonomi. Kaum migran pada aspek kapital ekonomi bergelut dalam aktifitas usaha ekonomi-menengah, penguasaan usaha di ruko, kios dan bentuk perdagangan lainnya seperti usaha emas dan proyek. Seperti pada penguasaan pasar juga kaum migran mendominasi perekonomian Papua di tengah adanya perubahan dan perluasan mode produksi domestik ke ekonomi pasar. Sentara-sentra ekonomi baik yang besar maupun sektor menengah-kecil dikuasai oleh mereka yang berasal dari etnis migran. Penguasaan tersebut karena menurut Akhmad (2005), karena tiga faktor, pertama, penetrasi pasar dalam kehidupan orang Papua akibat kehadiran orang Bugis; kedua, pertemuan mode produksi domestik dengan mode modern; ketiga, tidak semua hasil produksi subsiten dikonsumsi habis, ada sisa yang dijual di pasar. Walau sudah terjadi integrasi ekonomi ke dalam kehidupan orang Papua, namun pedagang Papua belum mampu bersaing dengan pedagang Bugis. Dari sini pedagang bugis dan lainnya berhasil menguatkan sumber daya dan jaringan yang ada dan jaringan tersebut dipelihara sebagai modal sosial dan mendapat pengakuan dalam *skill entrepreneur* (kapital simbolik).

Dalam aspek sumber daya manusia (kapital budaya) kaum migran manusia menjadi hal yang paling mendasar dari segalanya dibandingkan dengan Orang Asli Papua. Hal itu dapat dilihat misalnya dalam pemenuhan pasaran kerja, mereka banyak terserap khususnya dalam lingkup swasta sehingga dapat eksis dan bertahan hidup dalam dinamika kehidupan di Papua. Kaum migran aktif di Majelis-Majelis Taklim sehingga akan tampak mempengaruhi paham keagamaan dan perilaku keagamaan mereka. Demikian pula kapital budaya migran dengan mendirikan lembaga pendidikan Islam seperti YAPIS (Yayasan Pendidikan Islam), Yayasan Pondok Karya Pembangunan, Sentani (YPKP), SD Muhammadiyah, Sekolah sekolah yang dibangun oleh Darul Dakwah Wal Irsyad (DDI) serta Yayasan Incan Cendikia Jayapura (YICJ) telah mengelola pendidikan dengan baik.

Masih dalam kapital sosial dan budaya, meskipun pasca pemberlakuan otonomi khusus Papua mempunyai kewenangan dalam bidang politik pihak migran dianggap mempunyai posisi tawar yang tinggi dengan menempatkan orang-orangnya dalam berbagai partai politik, kaum migran membentuk dan masuk aktif di organisasi keislaman seperti MUI, Muhammadiyah, NU, ICMI, kaum migran aktif di organisasi kepemudaan, dan organisasi-organisasi keadaerahan (paguyuban) serta asosiasi-asosiasi lainnya. Semua aktifitas dan posisi tersebut tidak lepas dari kuatnya sumber daya dan jaringan yang ada pada masyarakat migran (Gere, 2015: 220).

Posisi antara orang migran dan orang Papua saling mengakui hubungan yang saling membutuhkan dan bekerja sama untuk mencapainya berbagai hal yang tidak dapat dilakukan sendirian. Orang melakukan dengan serangkaian jaringan dan mereka cenderung memiliki kesamaan nilai dengan yang lain dalam jaringan tersebut menjadi sumber daya, dia dapat dipandang sebagai modal yaitu modal simbolik (Field, 2016: 1).

Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa hubungan atau relasi selalu berakibat pada dominasi terhadap yang lainnya karena sumber daya dan strategi yang lebih dan kemampuan melakukan negosiasi diri atau negosiasi identitas (Chung, LC and Toomey 1999:39). Migran Muslim di Papua melakukan eksplanasi diri bagi keberlangsungannya dalam proses komunikasi antar budaya. Migran Muslim dengan identitasnya terus menkonstruksi citra dirinya yang selama ini dialami dan dikomunikasikan dengan Orang Asli Papua baik secara individu maupun kelompok. Termasuk komunikasi pada moment-moment tertentu disaat muncul ketegangan yang memperhadapkan antara kedua kelompok tersebut.

2.2.4. Identitas

Konstruksi sosial (Berger 1996) yang berjumpa dengan modal (Bordieu 1986) dalam hubungan antara Migran dengan Orang Asli Papua di atas, menghasilkan suatu kontestasi identitas, yang oleh Castells (2010), disebut politik identitas. Identitas merupakan penanda atau label terhadap sesuatu, tidak terkecuali individu, kelompok, atau bahkan barang serta hewan. Jika seseorang mengenal identitas terhadap sesuatu, maka ia akan memiliki pengetahuan terhadap sesuatu tersebut. Stryker, menyebut bahwa identitas baginya adalah memusatkan perhatian pada hubungan saling mempengaruhi di antara individu dengan struktur sosial yang relatif lebih besar (masyarakat) (Stryker, 2016). Identitas atau jati diri itu muncul dan ada dalam interaksi artinya jati dirinya diakui keberadaannya oleh orang lain dalam suatu hubungan yang berlaku (Suparlan, 2004: 25). Hakekatnya adalah cerminan pada diri manusia sendiri sekaligus sebagai pembeda dengan orang lain. Dapat dikatakan bahwa identitas diri manusia begitu pula identitas politik yang ada dalam spektrum kehidupannya maka disebut sebagai politik identitas.

Menurut Castells, (2010: 8) politik identitas merupakan partisipasi individu dan lebih ditentukan oleh budaya dan

psikologis seseorang. Jika proses pembentukannya dalam kondisi tertekan (identitas resistensi) yang disebabkan karena adanya dominasi pihak lain, maka akan muncul politik identitas. Heyes sebagaimana dikutip dalam (Buchori, 2014 : 27) melihatnya bahwa politik identitas merupakan penandaan aktivitas politis dalam pengertian yang lebih luas dan terisolasi terhadap ditemukannya pengalaman-pengalaman ketidakadilan yang dialami bersama anggota-anggota dari kelompok-kelompok sosial tertentu. Identitas itu kemudian dijadikan alat perjuangan untuk melawan kekuatan lain yang mengancam.

Politik identitas adalah nama lain dari biopolitik atau politik perbedaan, meskipun awalnya ini muncul dari perbedaan-perbedaan tubuh seseorang yang menjadikannya memiliki perbedaan dengan orang lain. Pendapat ini menekankan pada pentingnya identitas bagi individu maupun bagi suatu kelompok atau komunitas (Widayanti, 2009 : 14). Dari sini dapat dilihat bagaimana identitas awalnya hanya merujuk pada tubuh kemudian meluas menjangkau identitas diri, bahkan kelompok. Bahkan Lukmantoro melihat aspek kesamaan identitas dan karakteristik dari tindakan politik untuk mengedepankan kepentingan-kepentingan dari anggota-anggota suatu kelompok, baik pada basis pada ras, etnisitas, jender, atau keagamaan (Buchori, 2015: 20).

Menurut Latif (2009: 40) kemudian memberikan penekanan yang sama mengenai politik identitas sebagai "*politics of difference yang didasarkan pada pencarian perbedaan*". Bahkan lebih lanjut dikatakan bahwa, di seluruh dunia identitas yang mengukuhkan perbedaan etnis, agama, termasuk bahasa (Abdillah, 2002: 22). Dalam kajian sosiologi maupun politik biasanya dikategorikan bahwa identitas adalah identitas sosial sendiri seperti kelas, ras, etnis, gender, dan seksualitas, sedangkan identitas politik mencakup nasionalitas dan kewarganegaraan. Sehingga identitas sosial sendiri menjadi

penentu posisi 'subjek' dalam relasi sosial yang terbangun, sementara identitas politik menentukan posisi 'subjek' dalam komunitas melalui rasa kepemilikan sekaligus menandai posisinya dengan yang lain dalam suatu perbedaan (Setyaningrum, 2005: 19).

Singkatnya, politik identitas adalah konsep dan gerakan politik yang fokus perhatian dan kajiannya adalah perbedaan sebagai suatu kategori utama. Ia adalah tidak lain adalah suatu alat perjuangan politik suatu etnis untuk mencapai tujuan tertentu, dimana kemunculannya lebih banyak disebabkan oleh adanya faktor-faktor tertentu yang dipandang oleh suatu etnis sebagai adanya suatu tekanan berupa ketidak-adilan politik yang dirasakannya. Atas tekanan tersebut, mereka bangkit melakukan perlawanan melalui identitasnya untuk melawan segala bentuk ancaman, termasuk penindasan (baik fisik maupun non-fisik). Bahkan, untuk merebut kekuasaan, meskipun mereka melakukan manipulasi identitas dengan melakukan penyamaan dengan kelompok yang lain (Buchori, 2015: 24).

Secara proses, politik identitas merupakan partisipasi individual pada kehidupan sosial yang lebih ditentukan oleh budaya dan psikologis seseorang. Ia adalah hasil dari proses konstruksi dasar dari budaya dan psiko-kultural dari individu yang memberikan arti dan tujuan hidup. Terbentuk dari proses dialog internal dan interaksi sosial (Castells, 2010: 6-7). Sebuah Identitas yang ada tidaklah dari suatu proses yang dianggap final serta berakhir dan tidak pula dikatakan terjadinya totalitas atau esensi, melainkan adalah sebuah konstruksi sosial dan proses identifikasi yang tidak pernah selesai secara utuh (Hall, 1992) Identitas memiliki peran berupa kekuatan kuat bagi orang tempat identitas itu melekat. Dari sini, ada dua bentuk identitas, identitas individu dan pluralitas. Lanjut Castells, suatu identitas merupakan hasil dari suatu susunan, yang bersumber pada macam-macam sejarah, geografi, biologi, institusi produktif dan

reproduksi, memori kolektif, aparatur kekuasaan dan pernyataan agamawi. Dalam pembentukan identitas, individu, kelompok sosial, dan masyarakat harus memproses seluruh materi-materi ini, mengatur kembali maknanya, sesuai dengan determinasi atau ketetapan sosial dan proyek budaya yang berakar dari struktur sosial mereka, dalam kerangka waktu dan tempat (Castells, 2010: 7).

Terkait dengan ini, (Castells, 2010) menyebutkan bahwa identitas selalu terjadi dalam konteks yang ditandai oleh hubungan kekuasaan yang bentukannya berasal dari tiga proses. *Pertama*, identitas legitimasi (*legitimizing identity*) yaitu identitas yang diperkenalkan oleh sebuah institusi yang mendominasi suatu masyarakat untuk merasionalisasikan dan melanjutkan dominasinya terhadap aktor-aktor sosial, misalnya suatu institusi negara yang mencoba meningkatkan identitas kebangsaan anggota masyarakat. Institusi tersebut memang telah mendapatkan legitimasi untuk melakukan hal tersebut.

Kedua, identitas resisten (*resistance identity*) yaitu sebuah proses pembentukan identitas oleh aktor-aktor sosial yang dalam kondisi tertekan dengan adanya dominasi dan stereotipe oleh pihak-pihak lain sehingga membentuk resistensi dan pemunculan identitas yang berbeda dari pihak yang mendominasi, dengan tujuan untuk keberlangsungan hidup kelompok atau golongannya. Sebuah terminology yang ketika Calhoun mengidentifikasi munculnya politik identitas.

Ketiga, identitas proyek (*project identity*) yaitu identitas di mana aktor-aktor sosial membentuk suatu identitas baru yang dapat menentukan posisi-posisi baru dalam masyarakat sekaligus mentransformasi struktur masyarakat secara keseluruhan. Hal ini misalnya, terjadi ketika sekelompok aktivis feminisme berusaha membentuk identitas baru perempuan, menegosiasikan ulang posisi perempuan dalam masyarakat, dan akhirnya mengubah struktur masyarakat secara keseluruhan dalam memandang

peranan perempuan. Identitas sebagaimana yang dikaji dalam penelitian ini adalah identitas ekonomi, politik dan agama, masyarakat Migran Muslim di Papua. Ketiga hal tersebut sangatlah relevan mengingat aktivitas Migran Muslim tidak pernah lepas dari persoalan-persoalan ini.

Definisi konseptual mengenai politik identitas diatas, akan difokuskan penggunaan konsep politik identitas yang dikemukakan oleh Castells karena konsep yang ditawarkan paling relevan dalam konteks penelitian ini. Bangunan identitas seperti yang dikemukakan di atas, pada konteks Migran Muslim di Kabupaten Jayapura, Papua dapat diuji lebih jauh. Identitas legitimasi yang terbentuk merupakan hasil dari konstruksi institusi atau lembaga yang memiliki otoritas, misalnya KTP, Paspor, dan lain-lain. Melalui penanda bentukan tersebut, dengan mudah identitas seseorang (khususnya) dapat diketahui dan diidentifikasi, meskipun menurut Zen, identitas itu tidak pernah tunggal, tetapi selalu jamak (Zen, 2016: 27).

Bagi Castells, identitas merupakan persoalan yang juga diperjuangkan untuk memperoleh pengakuan. Migran muslim dan Orang Asli Papua masing-masing melakukan metode ini. inilah yang disebut Castells sebagai *resistance identity*. Adapun *project identity* merupakan identitas yang dibentuk dan diperuntukkan untuk menuju pada *legitimate identity*. Teori Identitas Castells ini memberikan pemahaman bahwa identitas sesungguhnya sangat berkaitan dengan “makna”. Identitas memberikan makna baik sebagai Individu maupun sebagai kelompok. Makna disini adalah nilai-nilai baik budaya, moral, agama, etnik yang dimiliki atau didapat dari seseorang/kelompok berdasarkan identitas yang dimiliki dan yang melekat pada dirinya tersebut “*The Power of Identity*”, demikian salah satu karya Castells menggariskan bahwa identitas memiliki *power* atau kekuatan bagi setiap orang atau kelompok (Bupolo, 2010).

Dalam konteks penelitian ini, pemerintah telah melakukan berbagai upaya melalui kebijakan-kebijakannya sehingga muncul tipologi antara migran dan Orang Asli Papua di Kabupaten Jayapura, Papua. Hal ini misalnya dapat dilihat dari program otonomi khusus Papua dan program percepatan pembangunan Papua. Dari sini kemudian ada ruang ‘negosiasi’ identitas baik migran maupun Orang Asli Papua yang memiliki tujuan yang sama, yaitu mendapat pengakuan. Untuk menguatkan pengakuan bagi keberadaan kaum migran, mereka membentuk organisasi yang bersifat etnisitas (kesukuan) yang mereka sebut Paguyuban Nusantara, bergabung dalam organisasi keagamaan serta aktif dalam berbagai organisasi politik yang ada untuk memperkuat posisi tawar mereka.

Bagan 2.1
Kerangka Pikir Penelitian

